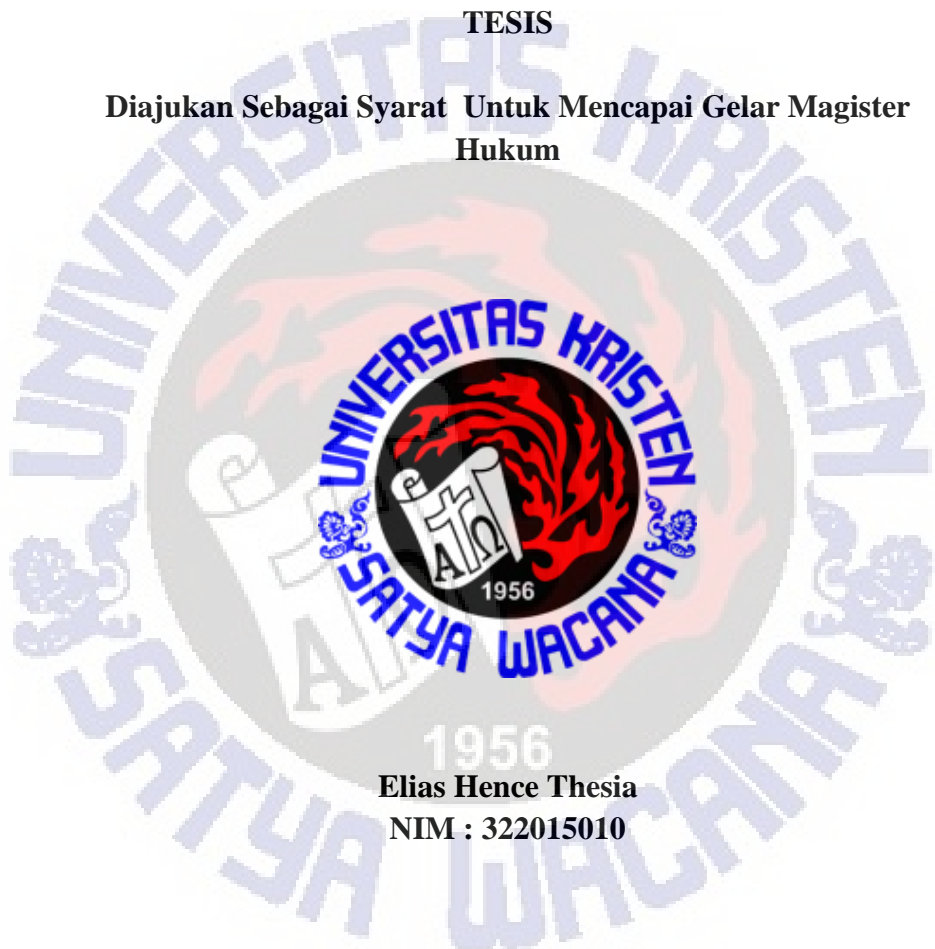


KEBIJAKAN TRANSMIGRASI LOKAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

TESIS

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Hukum**



**Elias Hence Thesia
NIM : 322015010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2017**



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elias Hence Thesia
NIM : 322015010 Email : elwsthesia@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Kebijakan Transmigrasi Lokal Pemerintah Provinsi Papua

Pembimbing : 1. Dr. Krisna D. Darumurti, S.H., M.H.
2. Romanti R.E. Fobia, S.H., MIDS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 22 September 2017



Elias Hence Thesia



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elias Hence Thesia
NIM : 322015010 Email : eliasthesia@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Kebijakan Transmigrasi Lokal Pemerintah Provinsi Papua

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dengan kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 22 September 2017

Elias Hence Thesia

Mengetahui,

Dr. Dr. Krisna D. Darumurti, S.H., M.H.

Romati R.E. Fobia, S.H., MIDS

Lembaran Persetujuan

KEBIJAKAN TRANSMIGRASI LOKAL PEMERINTAH PROPINSI

PAPUA

TESIS

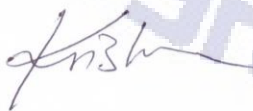
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum

Elias Hence Thesia

NIM: 322015010

Telah disetujui Pada Tanggal September 2017

Pembimbing I



Dr. Krishna D. Darumurti, S.H., M.H

Pembimbing II



Romamti E.S. Fobia, S.H.,MIDS.

Lembaran Pengesahan

**KEBIJAKAN TRANSMIGRASI LOKAL PEMERINTAH PROPINSI
PAPUA**

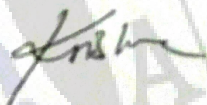
Elias Hence Thesia

NIM: 322015010

Program Studi Magister Ilmu Hukum


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Krishna D. Darumurti, S.H., M.H.

Pembimbing II



Romanti E.S. Fobia, S.H., M.H.S.

Mengesahkan

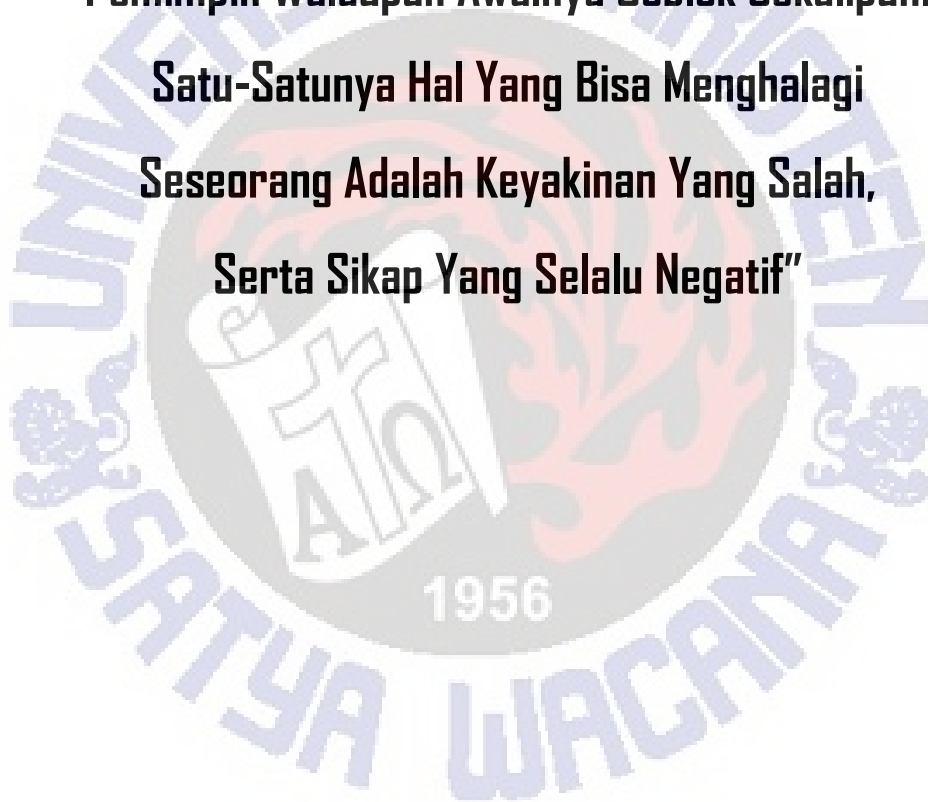
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Umbu Rauta S.H., M.Hum.

MOTO

**“Semua Orang Bisa Menjadi Jenius Dan
Pemimpin Walaupun Awalnya Goblok Sekalipun.
Satu-Satunya Hal Yang Bisa Menghalangi
Seseorang Adalah Keyakinan Yang Salah,
Serta Sikap Yang Selalu Negatif”**



Lembaran Pernyataan Orisinalitas Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elias Hence Thesia

NPM : 322015010

Judul Tesis : Kebijakan Transmigrasi Lokal Pemerintah Provinsi Papua

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa dalam penulisan Tesis yang berjudul: Kebijakan Transmigrasi Lokal Pemerintah Provinsi Papua” tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil ahli sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia di cabut hak saya sebagai lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas UKSW atau dicabut gelar yang telah diberikan serta akibat hukum lainnya.

Demikian pernyataan ini di buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Salatiga, September 2017



Elias Hence Thesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Tesis ini akan membahas mengenai kebijakan – kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program transmigrasi lokal di Papua dengan melakukan kekuasaan diskresi pemerintah. Serta melakukan pendekatan dengan undang-undang mulai dari tingkat di pusat sampai di tingkat daerah terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan para pihak dan karena itu ucapan terima kasih patut saya sampaikan kepada mereka.

Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Krishna Djaya Darmuti, S.H., .M.H. sebagai pembimbing I dan Romamti Ezer Simri Fobia, S.H., MIDS sebagai pembimbing II yang tiada lelah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan selama penulisan tesis sampai dapat terselesaikan.

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum UKSW yang telah mengajar dan mencurahkan ilmunya kepada saya: Prof. Teguh Prasetyo S.H., M.Si., Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum., Dr. Umbu Rauta, S.H, M.Hum., Dr. Tri Budiono, S.H., M.Hum., Dr. Krishna Djaya Darmurti, S.H.,M.H., Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum., Pak Theofransus Litaay, S.H., LL.M. Ph.D, Dr.Christina Maya Indah, S.H.,M.Hum, Dr.Dyah Haspari Prananingrum, S.H., M.Hum., Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H, Pak Kustadi, S.H.,M..Hum., Ibu Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum., Pak Arie Siswanto, S.H.,M.H., Ibu Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S., Pak Yakub Adi

Krisanto, S.H.,M.H., Pak Jeferson Kameo, S.H.,LL.M., Ibu Jumiarti, S.H., M.Hum., Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H., Pak Yafet Yosafat Wilben Rissy, S.H., M.Si.,LL.M., Pak Dwi Heru Wismanto Sidhi, S.H., M.H., Ibu Indriani Wauran, S.H., M.H., Pak R.E.S. Fobia, S.H., MIDS., Prof.Surpamono, S.E., MBA., DBA., Pak Marwata, SE.Msi., PhD.Ak.CA., Dr. Marthen Toelle, S.H., M.H., dan Juga Staf Administrasi: Pak Umar Basuki, S.H., Ibu Widya Kurniawati, S.Si., Ibu Sri Buniati, Pak Yusuf Ponima, Pak Andrias Natalia Utama, SE.

Setulusnya saya ucapkan terima kasih kepada para penguji yang telah bersedia menilai Naskah Proposal Tesis, Tesis dan menjadi penguji pada setiap tahapan ujian tesis saya: Pak Kustadi, S.H.,M..Hum

Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UKSW: Susan Tewernussa, S.H, Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H Pajaro Lombu,S.H. Rambu Susanti, S.H. Samparisna Kbarek,S.H. Fitri Lukmatiabla,S.H. Delon Kohunusa, S.H. Reymon Latidjawa, S.H. Alli Topa, S.H. Febrian Manuhutu, S.H. Pieter Martino.S.H. Sergio Arison, S.H. Munif Ibnu,S.H. Gatra, S.H. Daniel, S.H. Wiliam Pais, S.H., M.H. Dessy Mustika Sari,S.H.

Tak Terlupakan ucapan terima kasih kepada mereka yang saya cintai dan kasihi: Julio Faot, Tommy Meage, Simon Kotoki, danielo revasi, alfa pekei, Docktus Kambu, Nando Fatem, Billy ruow, vensca Lesiputi, Silvia krar, Meyvi. wairata, Edwi lesiputi, Rioni rahagmeta, hein, sefnat Rumoirusi, Niko Pattuju, Shandi,Ricky, Betto Sanggenafa, Ateng Indey, Kristian

Wambrau, Harol, Eqi Yaas, Kaka Albert Rumboirus, Kaka Aci Rumboirusi, Kaka Etholson Rumbrure, Kaka Roubertho Sebba roberto seba louhenapessy, Kaka Mosby Sawor, Samuel Heseggem, kaka Roni Rumawak, Kaka Yosep Basna.

Saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan study saya dan tesis saya tanpa campur tangan pertolongan mereka, yang masing-masing saya sebutkan di atas. Begitu juga buat keluarga tercintah mama, Kaka Thonce Thesia , Kaka Paskalina Thesia, Kaka Anthon Thesia, Tanta Yohana Thesia, Om Mecky Deda, mama ade Yokbet sesa, Tinus Kogoya, Herol sesa, Yohana Momot, atas dukungan dan doa yang selalu di panjatkan tiada henti-hentinya agar terselesaikannya Study S2 saya.

Semoga tesis ini dapat memenuhi harapan keilmuan di bidang ilmu hukum dan harapan semua pihak atas tesis saya ini. Tuhan berkati.

Salatiga, 20 Agustus 2017

KATA PENGANTAR

Tesis ini akan membahas mengenai kekonsistenan program transmigrasi yang di dibuat oleh pemerintah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terlebih khusus di Provinsi Papua yang mengeluarkan kebijakan yang berasas Diskresi dengan memberlakukan peraturan daerah provinsi No. 15 tahun 2008 Tentang Kependudukan berdasarkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Papua, di mana perda tersebut mengatur program-program yang di buat oleh pemerintah pusat salah satunya adalah pengaturan tentang program transmigrasi. Berbicara mengenai transmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan Undang - Undang No. 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang No. 29 Tahun 2009, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Program-program yang dikembangkan diantaranya adalah pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi, seperti pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan permodalan.

Namun secara ekstrem posisi penulis justru berpandangan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terlebih khusus di Papua dengan mengeluarkan pengaturan diskresi pada peraturan-peraturan daerah No. 15 tahun 2008 tentang Kependudukan yang menghambat jalannya program-program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa Negara Kita merupakan negara Hierarki sehingga setiap daerah dapat membuat yang boleh membuat peraturan daerahnya masing-masing asalkan tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum., walaupun adanya pemerian otonomi khusus yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Mengingat bahwa pemerintah yang memegang kekuasaan diskresi pada hakikatnya memegang kekuasaan amat besar, tetapi kekuasaan tersebut tidak demi dirinya sendiri atau demi kekuasaan itu sendiri. Karena itu tidak salah ketika jhon Locke mengklaim bahwa pemerintah memiliki kapasitas: *“to act according to discretion, for the publick good, without the prescription of the law, and sometimes even against it”* namun penulis beranggapan bahwa setiap tindakan diskresi yang di buat oleh pemerintah harus dilakukan untuk kepentingan bersama dan tidak bertangan dengan kepentingan umum. Sehingga dari Bab-perbab pada tesis ini dapat di perjelas, mengenai pelaksanaan transmigrasi dan tujuan dari pelaksanaan program transmigrasi di

pusat-di daerah- daerah dengan melihat peraturan yang berlaku
peraturan pada tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Salatiga, 20 Agustus 2017

Elias Hence Thesia



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
MOTO	iii
LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	19
BAB II KEBIJAKAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI PAPUA	22
A. Kebijakan Publik Sebagai Tindakan Diskresi Pemerintah	22
B. Sejarah dan Tujuan Transmigrasi di Indonesia	27
1. Sejarah Transmigrasi di Indonesia	27
a. Transmigrasi Era Kolonial Belanda	27
b. Transmigrasi Pasca Kemerdekaan	28
c. Transmigrasi Periode Reformasi s/d Sekarang	30
2. Tujuan Transmigrasi di Indonesia	32

C. Pengaturan Dan Kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat	38
1. Pengaturan Transmigrasi Pemerintah Pusat	38
2. Kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat.....	42
D. Pengaturan dan Kebijakan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua	49
1. Otonomi Dan Kewenangan Pemerintah Daerah	49
a. Otonomi Pemerintah Daerah	49
b. Kewenangan pemerintah Daerah.....	54
2. Pengaturan dan Kebijakan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua	58
a. Pengaturan Transmigrasi Lokal di Provinsi Papua	58
b. Kebijakan Transmigrasi Lokal Provinsi Papua	61
BAB III KEBIJAKAN TRANSMIGRASI DI PAPUA SEBAGAI TINDAKAN DISKRESI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	66
A. Keabsahan Hukum Peraturan Daerah	66
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis berkaitan dengan program transmigrasi yang merupakan program pemerintah dalam rangka pembangunan yang diamanatkan Undang - Undang No. 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang No. 29 Tahun 2009, memiliki tujuan *untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.* Program-program yang dikembangkan diantaranya adalah pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi, seperti pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan permodalan.

Mendudukkan transmigrasi sebagai salah satu solusi bagi permasalahan pemerataan pembangunan merupakan satu kebijakan yang tepat, mengingat program ini terbukti mampu menciptakan kesempatan berusaha dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, transmigrasi telah terbukti dapat membangun atau mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Jika dicermati secara seksama, menjadi suatu keanehan kemudian apabila program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada akhirnya ‘dijegal’ oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 15 Tahun 2008 Tentang kependudukan dengan menggunakan asas Diskresi.

Hal ini tentu saja terdapat unsur pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Dalam hierarki penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah yang kemudian dibingkai dalam konstruk otonomi daerah, idealnya adalah Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk

memastikan keberhasilan dan kesuksesan program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dimaksud. Sambil menunggu 20 juta Jiwa Pemerintah Provinsi Papua membuat suatu program yang sama persis dengan transmigrasi namun di lakukan untuk masyarakat Lokal (*Translok*). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Perda terkait larangan transmigrasi tersebut merupakan produk hukum yang cacat hukum dan cenderung bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya.

Kata Kunci : *Transmigrasi, Asas Diskresi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Papua*

